

BPK Selamatkan Uang Negara Rp 218 M

SEMARANG -Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jateng mengklaim telah menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp 218 miliar dari penyelewengan yang dilakukan pemerintah daerah sejak 2009-2014.

Kepala Perwakilan BPK Jateng, Cris Kuntadi menuturkan, selama ini BPK berkomitmen dalam penyelamatan keuangan Negara dengan menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa. Sejak 2009-2014, BPK telah melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebanyak 3.119 temuan dengan nilai Rp 677 miliar.

Kemudian, berdasarkan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang dilakukan di sejumlah BUMN

atau BUMD sebesar 1.119 temuan sebesar Rp 173 miliar.

"Dari hasil temuan BPK, sebagian besar didominasi adanya sistem pengendalian intern (SPI) yang lemah. Tercatat ada 1.771 temuan karena hal tersebut," tuturnya saat media *workshop* di kantornya Jalan Perintis Kemerdekaan, kemarin.

Kinerja Aparatur

Selain karena kelemahan pada sistem pengendalian intern, yaitu kelemahan administrasi sebesar 943 temuan. Kemudian, kerugian negara 893 temuan senilai Rp 187 miliar, potensi kerugian negara 58 temuan sebesar Rp 21 miliar, kekurangan penerimaan 494 temuan sebesar Rp 173 miliar serta ketidakmerataan dan tidak efisien sebanyak 580 temuan dengan nilai Rp 468 miliar.

Dari jumlah tersebut, BPK sudah menindaklanjuti hasil temuan penyelewengan. Yang telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 7.125 kasus dengan nilai kerugian Rp 218 miliar.

Sementara, soal belum sesuai dan masih dalam proses tindak lanjut masih ada 2.742 kasus dengan nilai kerugian Rp 150 miliar, dan yang ditindaklanjuti 338 kasus dengan nilai kerugian Rp 13 miliar, serta tidak dapat ditindaklanjuti sebesar 4 kasus.

Selama ini, kata Cris, BPK bertugas melakukan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. BPK merupakan pemeriksa eksternal pemerintah yang merupakan badan independen sehingga hasil pemeriksaan lebih objektif.

Menurut dia, pemeriksaan keuangan negara sangat diperlukan yaitu untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah, memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktik KKN serta menegakkan peraturan berlaku.

Adapun, lingkup pemeriksaan BPK antara lain, dana APBN atau APBD, kekayaan negara atau daerah yang dikelola sendiri termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMN atau BUMD dan kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah.

"BPK berupaya terus mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara," ujarnya. (K14-90)